

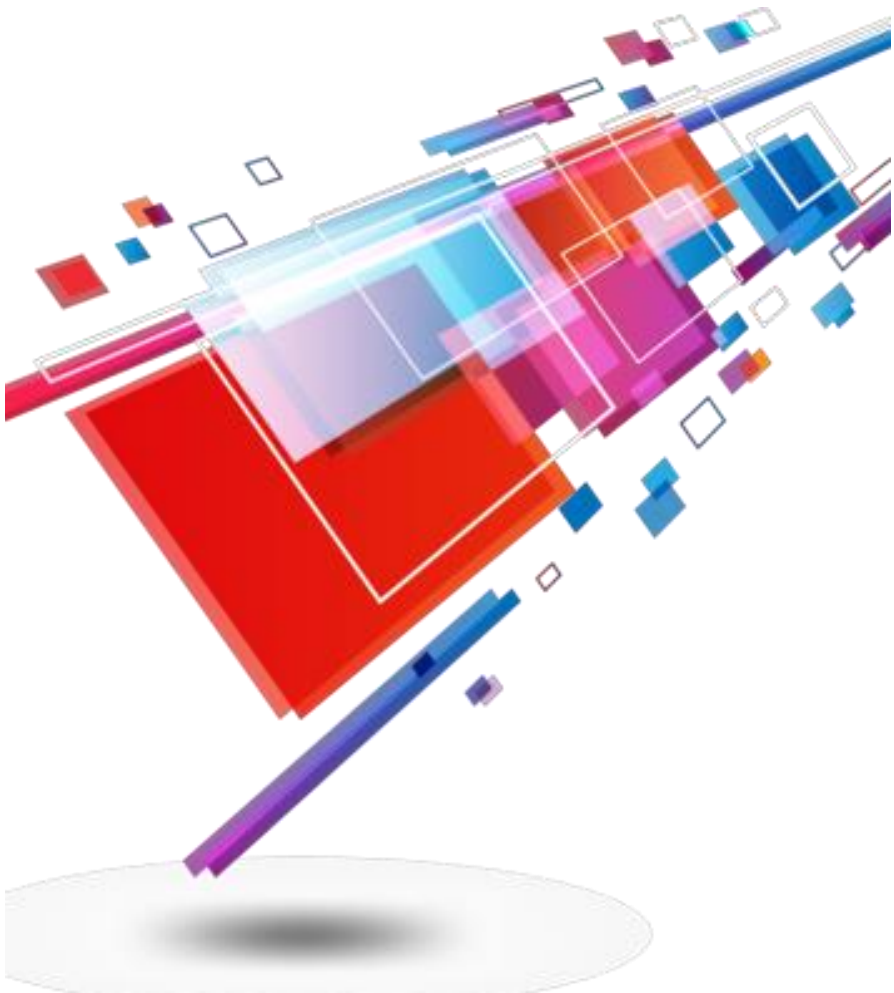


# LOMPATAN KE3

Laporan Tahunan Penabulu  
Tahun 2016

# Index

- **Visi dan Misi Organisasi**
- **Catatan Tahun 2016**
- **Program Penabulu Tahun 2016**
- **Catatan Program Tahun 2016**
- **Opini Audit Tahun 2016**
- **Figur Keuangan Tahun 2016**



# Visi

“Masyarakat Sipil Indonesia yang Berdaya”

# Misi

Mendorong keberdayaan dan keberlanjutan posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi; mobilisasi, pengelolaan dan penyaluran sumber daya; pengembangan kemitraan setara antar sektor pembangunan serta penggalangan partisipasi dan keterlibatan publik seluas-luasnya.



# Catatan tahun 2016

**Eko Komara**

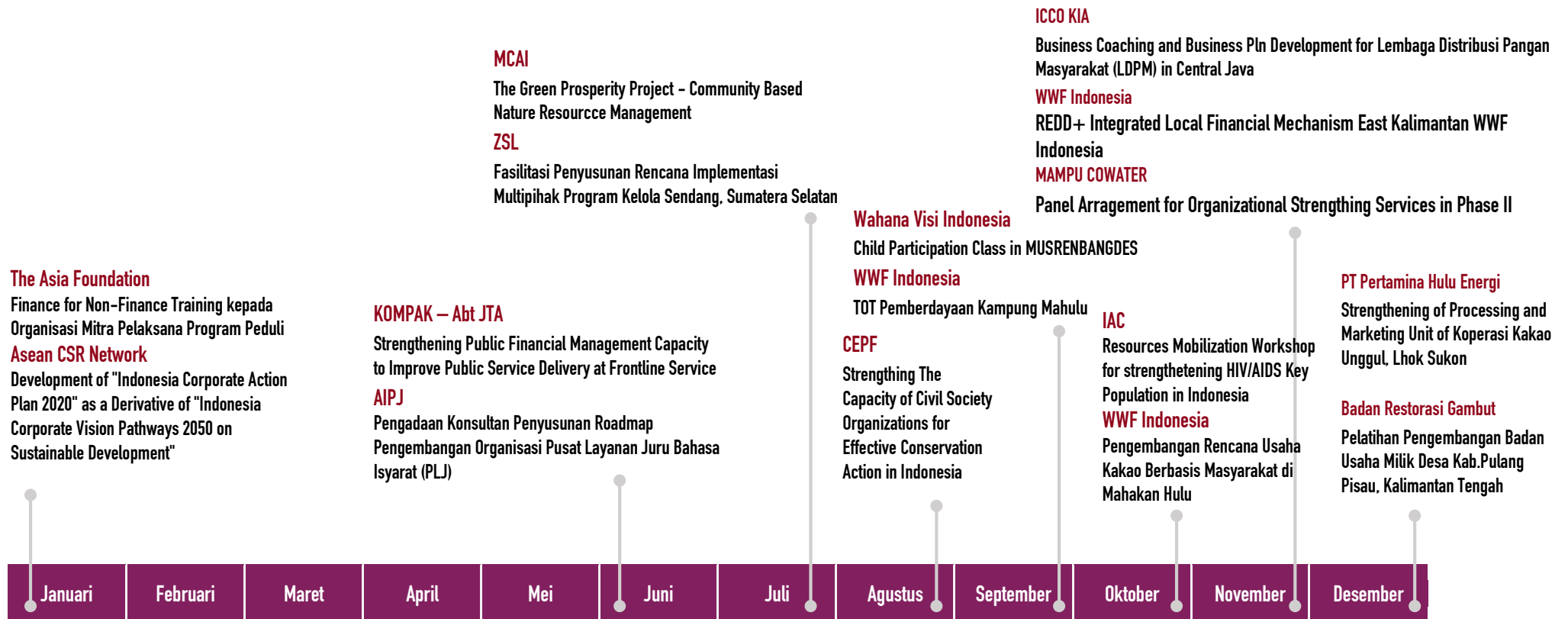
Direktur Eksekutif

“ Tahun 2016 merupakan tahun kedua Penabulu di siklus pertumbuhan ke-3. Di periode ini, kami menyadari bahwa definisi ‘masyarakat sipil’ perlu dimaknai ulang. Bukankah: komunitas pengelola sampah, kelompok-kelompok relawan, jurnalis independen, asosiasi profesi, usahawan sosial, kelompok-kelompok perempuan dan juga komunitas-komunitas difabel atau inisiatif kolektif lainnya yang menyodorkan solusi alternatif dan bahkan sekitar 74 ribu desa yang kini memperoleh sumber daya tambahan; seluruhnya merupakan elemen masa kini dari masyarakat sipil Indonesia?

Kami meyakini di masa depan peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan akan semakin tak tergantikan sebagai penjaga keseimbangan akhir di antara aktor pembangunan lainnya: pemerintah dan sektor bisnis. Namun keberadaan masyarakat sipil sendiri sesungguhnya terancam oleh beberapa masalah internal, antara lain kesenjangan sumber daya pendukung kerja jangka panjang, lemahnya kapasitas kelembagaan dan buruknya konsolidasi kekuatan di masing-masing sektor isu.

Sebagai organisasi yang sedang mendorong diri untuk mengambil peran sebagai ‘civil society resource organization’ kami dengan sungguh-sungguh memobilisasi, mengelola dan menyalurkan sumber daya dalam bentuk apapun demi mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia. Konversi energi kemudian menjadi kalimat kunci bagi kami. Merubah energi menjadi ruang tumbuh bersama, ruang konsolidasi kekuatan ide, gagasan dan keberpihakan masyarakat sipil di Indonesia, menjadi pemicu dan pemacu tata kelola pembangunan negeri ini yang lebih baik di masa depan”

# Program Penabulu Tahun 2016



## USAID-DERAP

Delivering Expanded Resources for AIDS Program

## IDRAP

Peningkatan kapasitas tata kelola desa di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

ExxonMobil Oil Indonesia Inc.

Pengembangan Unit Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Kakao di bawah Koperasi Petani Kakao di Lhok Sukon, Aceh Utara, NAD

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Yayasan KBSR dan Kapasitas Pengelolaan Unit Usaha Milik Yayasan

## SGF

Program Desa Lestari di DI Yogyakarta

Selengkapnya : <http://penabuluanalliance.org/program/>

Sesuai dengan 9 isu strategis yang diusung oleh Penabulu, tahun 2016 merupakan tahun yang menjadi awal lompatan ke 3 bagi organisasi. Beragam program di luar program reguler organisasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat digagas dan mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak, baik dari donor maupun private sektor.

Sesuai dengan arus keuangan Yayasan Penabulu tahun 2016, tercatat tidak kurang dari 20 program dalam berbagai skala pendanaan dikerjakan di periode ini, pada saat sama Penabulu juga melakukan ekspansi wilayah kerja dengan titik tekan di wilayah Indonesia Timur.

Salah satu program yang turut mendukung upaya ini adalah “Program Penguatan Kapasitas OMS untuk Aksi Konservasi yang Efektif di Indonesia” dengan dukungan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), bagi organisasi yang bekerja di wilayah Wallacea yang bekerja untuk aksi konservasi di wilayah tersebut. Di tahun pertama, program telah berhasil melatih 50 organisasi lokal di wilayah Ternate, Flores, Luwuk, Ammbon, dan Manado dengan fokus pada manajemen program. Pelatihan ini merupakan proses penyiapan organisasi lokal di wilayah kerja CEPF supaya mereka mampu untuk mengakses pendanaan dari CEPF siklus ke 2. Pelatihan ini membuahkan hasil 20 organisasi lokal yang lolos seleksi dan mendapatkan dukungan dari CEPF, baik dalam skala pendanaan *besar (large grant)*, maupun skala pendanaan kecil (*small grant*).

# 9

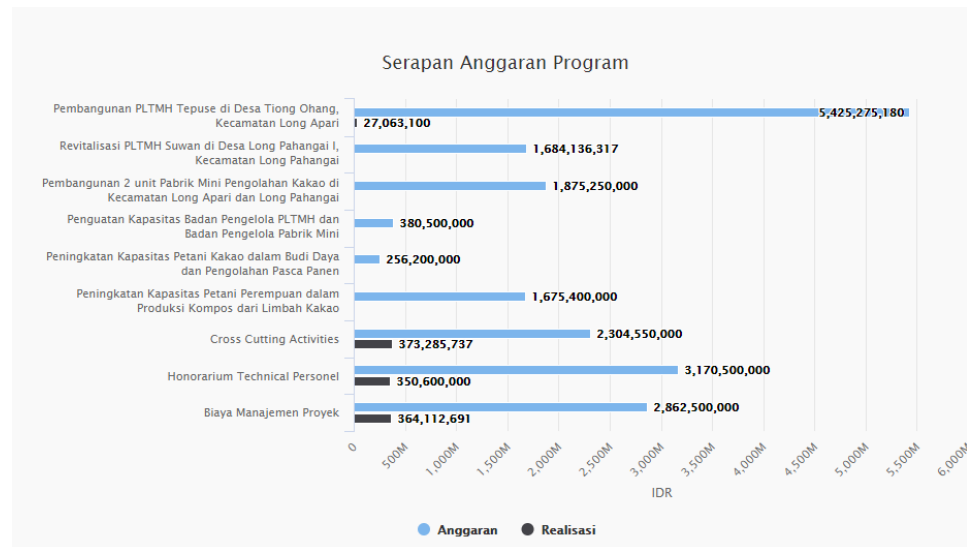
## ISU STRATEGIS PENABULU

- **Pembangunan Inklusif**
- **Pasar Berkelanjutan**
- **Kemitraan Pemerintah – Swasta-Komunitas**
- **Kehutanan dan Lingkungan**
- **Pemberdayaan Desa**
- **Kesehatan Masyarakat**
- **Akuntabilitas Publik**
- **Penguatan Kelembagaan**
- **TIK dan Pengelolaan Pengetahuan**

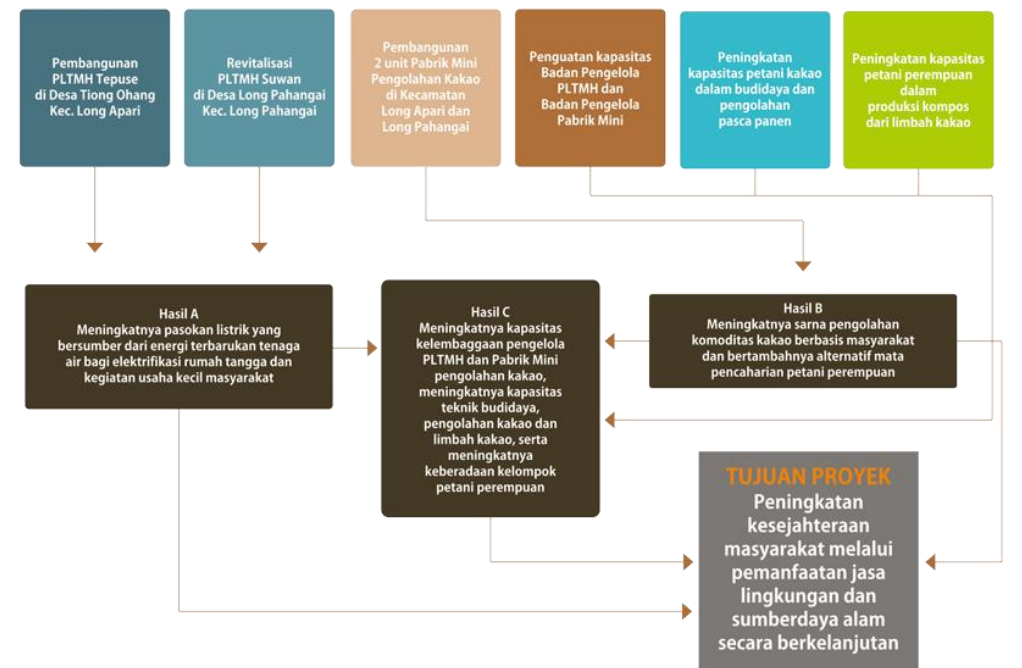
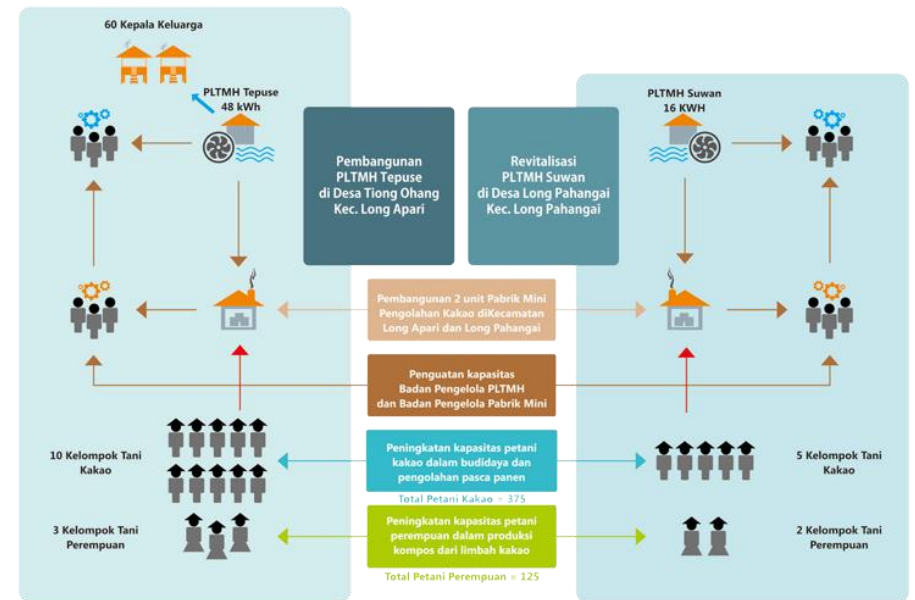
Program lain dalam isu kehutanan dan lingkungan adalah Proyek Kemakmuran Hijau – Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat. Proyek bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan model pemanfaatan energi terbarukan tenaga air skala kecil yang berguna bagi elektrifikasi rumah tangga dan bagi peningkatan usaha kakao kelompok masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, Mahakam Ulu Kalimantan Barat.

Program ini merupakan kerja kolaboratif antara Penabulu dengan RCE Engineering dan Perkumpulan Bina Benua Puti Jaji.

Capaian program hingga akhir tahun 2016, berdasarkan data pemantauan sebagai berikut:



Selengkapnya tentang program ini dapat disimak di : [PSDABM](#)





Workshop Mobilisasi Sumberdaya Komunitas Populasi Kunci



Mini Workshop Penyusunan Road Map Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat

Wilayah Akuntabilitas Publik mendapatkan dukungan dari KOMPAK ABT-Jta melalui program “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Publik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Layanan Garis Depan”. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia pada peningkatan kapasitas kabupaten, kecamatan, dan unit layanan garis depan di PFM dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah dalam PFM, terutama di unit layanan garis depan dan untuk mengoptimalkan PFM sebagai sarana untuk mendukung perbaikan dalam pelayanan publik. Diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas laporan keuangan publik oleh pemerintah sub-nasional dan kualitas belanja daerah pada saat yang sama. Kegiatan yang dilakukan di tahun 2016 adalah pemetaan dan meninjau modul yang ada di pelatihan pengembangan kapasitas PFM yang disediakan oleh Dephut (DJPK) dan oleh departemen lain. Mengembangkan dan menyempurnakan modul, yang akan terdiri dari 3 jenis modul layanan garis depan.

Di tahun ini isu pembangunan inklusif, mendapatkan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice dari melalui proyek “Pengadaan Konsultan Penyusunan Roadmap Pengembangan Organisasi Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ)”. Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan organisasi yang akan menjadi acuan bagi PLJ dalam mengembangkan organisasi, menentukan tujuan/sasaran organisasi dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut di masa depan sesuai dengan karakteristik PLJ. Peta jalan yang dihasilkan diharapkan memiliki fleksibilitas dan mampu memberikan beberapa alternatif cara/jalan bagi PLJ dalam mencapai tahapan-tahapan dalam peta perjalanan pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PLJ. Hasil lain program ini adalah bermitranya Penabulu dengan PLJ serta Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) yang menjadi induk dari organisasi difabel Tuli.



# KELEMBAGAAN EKONOMI DESA

MENINGKATKAN POTENSI DENGAN...



Tahun 2016 merupakan tahun ke 2 sejak diluncurkannya UU Tentang Desa. Di saat yang sama, isu pengembangan kelembagaan ekonomi desa mulai menguat, salah satu indikator yang muncul di permukaan adalah maraknya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di berbagai wilayah di Indonesia.

Tahun ini kerja Penabulu untuk pemberdayaan desa semakin berkembang dan meluas. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, Di Yogyakarta merupakan wilayah baru yang menjadi fokus kerja pemberdayaan desa. Sementara untuk program Desa Lestari yang didukung oleh SGF mulai masuk pada inisiasi kelompok perempuan dan petani untuk kewirausahaan.

Di tahun ini pula, Penabulu telah menyelesaikan modul Tata Cara Penyusunan RPJMDes, dan merampungkan penelitian tentang analisa potensi dan masalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Bleberan, Desa Ponjong, dan Desa Sumbermulyo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain melahirkan produk pengetahuan, di akhir tahun 2016, Penabulu dipercaya oleh Badan Restorasi Gambut – BRG (*sebuah Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, untuk melakukan upaya-upaya restorasi lahan gambut di Indonesia*) untuk menjadi salah satu narasumber dalam Jambore Masyarakat Gambut pada bulan November 2017, dengan tema "Kelembagaan Ekonomi Desa".

Tidak hanya itu, Penabulu kemudian juga melatih perwakilan dari 9 desa di Kecamatan Jabiren Raya dan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu wilayah kerja BRG dalam kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, pada akhir tahun 2016.

Dalam kerangka keberlanjutan organisasi, di tahun ini Penabulu kembali bersinggungan dengan komunitas populasi kunci di isu HIV/AIDS melalui proyek “Resources Mobilization Workshop for strengthening HIV/AIDS Key Population in Indonesia” dengan dukungan dari Indonesia AIDS Coalition. Workshop ini melatih kelompok komunitas jaringan populasi kunci TB/HIV di 75 Kota/Kabupaten. Hingga akhir tahun 2016 Penabulu telah melakukan workshop di 28 Kota dan Kabupaten wilayah jaringan IAC, dengan penerima manfaat tidak kurang 200 organisasi dan organisasi komunitas.

Masih dalam kerangka keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Di tahun ini Penabulu menginisiasi model skema pendanaan publik untuk organisasi masyarakat di sektor advokasi Hak Asasi Manusia. LBH Makassar menjadi mitra strategis yang digandeng oleh Penabulu untuk penyusunan model ini. Sebagai organisasi yang telah berusia lebih dari 30 tahun, LBH Makassar telah menunjukkan relevansi atas keberadaannya, di sisi lain posisi strategis LBH Makassar di pintu masuk menuju Indonesia Timur membuat organisasi ini cukup memiliki peran yang signifikan di sektor advokasi struktural. Hingga akhir tahun 2016, kerja sama kemitraan ini telah masuk pada tahapan pengembangan mekanisme dan platform yang tepat yang akan dipergunakan untuk dapat menampung donasi dari masyarakat.

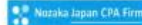
Selain donasi publik di sektor advokasi, pada saat yang sama Penabulu juga mengembangkan skema investasi sosial untuk pendanaan bagi sektor seni dan budaya di Indonesia, program ini bernama Art and Culture Investment. Catatan di akhir tahun 2016, program ini telah menyelesaikan skema besar model dan alur aktivitas yang akan dilakukan sesuai dengan peran masing-masing pihak pendukung program.



*Baruga Paralegal Kasi-Kasi, LBH Makassar*



**ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY**  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
KANTORPUSAT : NIU.KAP : 586/KM.I/2007  
Member of : Nozaka Japan Certified Public Accountant Firm



Pusat : Jl. Kepu Barat No. 96-91 B Kemayoran Jakarta Pusat Telp. : 021 - 4247872, 4264971 Fax : 021 - 4246080  
website : www.kaprhj.com, E-mail : kap\_rhjj@yahoo.co.id  
Cabang : Jakarta Mangrove, Bandung & Semarang

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**  
No. : 23/ARHJ-RD/HERS-YP/GA/04.17

**Badan Pengurus dan Pengawas  
Yayasan Penabulu  
Jakarta**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Penabulu terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**  
Number : 23/ARHJ-RD/HERS-YP/GA/04.17

**Board of Executives and Supervisory  
Yayasan Penabulu  
Jakarta**

We have audited the accompanying financial statements Yayasan Penabulu which comprise the financial statements as of December 31, 2016 and 2015 the related statement of activities, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditor's responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but



**ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY**  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
KANTORPUSAT : NIU.KAP : 586/KM.I/2007  
Member of : Nozaka Japan Certified Public Accountant Firm



Pusat : Jl. Kepu Barat No. 96-91 B Kemayoran Jakarta Pusat Telp. : 021 - 4247872, 4264971 Fax : 021 - 4246080  
website : www.kaprhj.com, E-mail : kap\_rhjj@yahoo.co.id  
Cabang : Jakarta Mangrove, Bandung & Semarang

merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami percaya bahwa bukti audit kami telah memperoleh cukup dan tepat untuk memberikan dasar untuk menyatakan opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir yang kami sebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Penabulu tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan Penabulu as of December 31, 2016 and 2015 its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

**ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY**



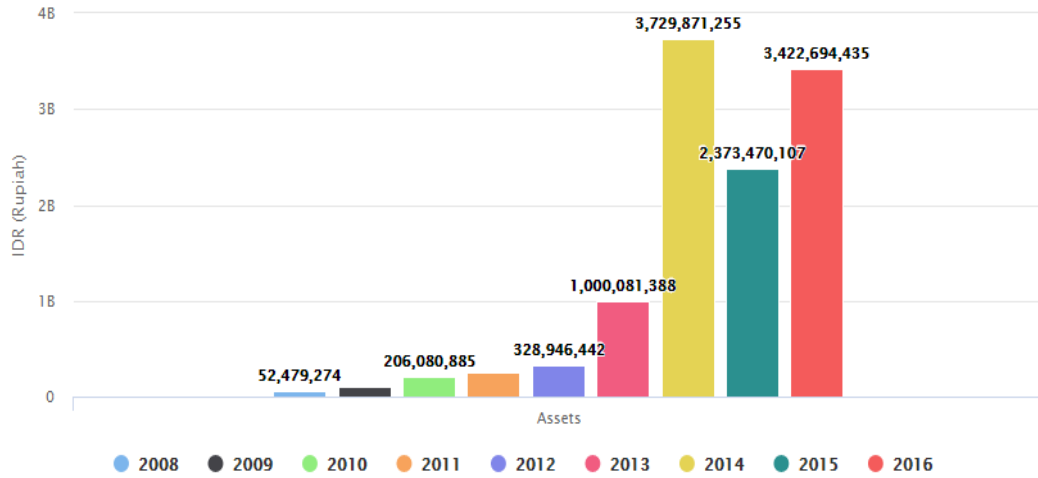
**DR. Achmad R.K. Ak., MM., CPA., CA**  
NRAP AP. 0102/Public Accountant Registration Number AP.0102

Jakarta, 25 April, 2017/April 25, 2017

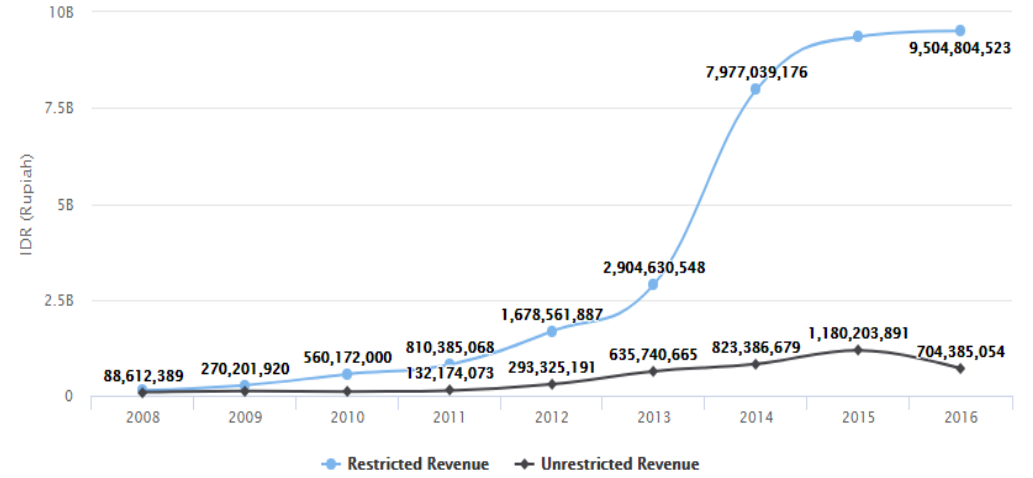
The accompanying financial statements are not intended to present the financial positions, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

# Figur Keuangan Tahun 2016

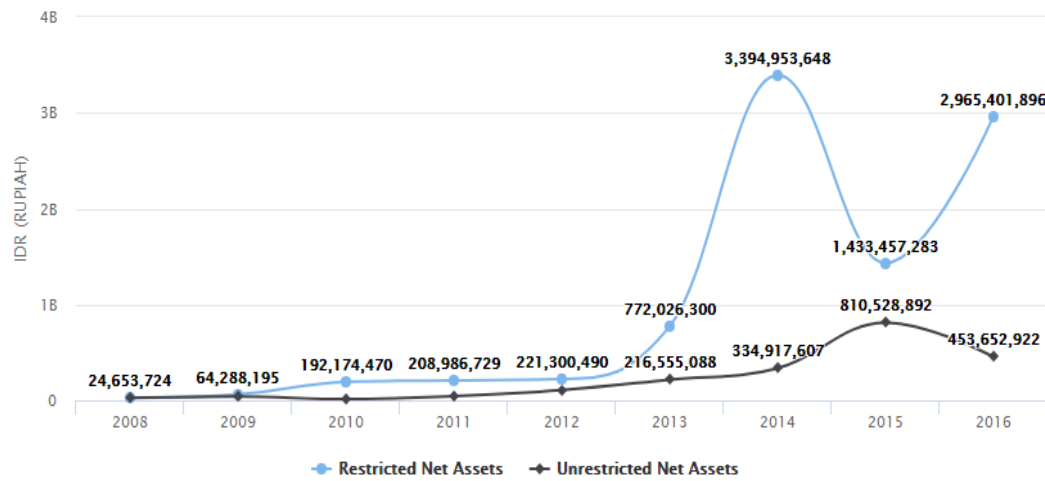
## Assets



## Revenue



## Restricted Net Assets & Unrestricted Net Assets



## Expenses

